

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menggambarkan peningkatan kapasitas suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur hal ini adalah laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menandakan adanya peningkatan aktivitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Namun, dalam konteks pembangunan jangka panjang, kualitas pertumbuhan jauh lebih penting daripada sekadar angka statistik. Pertumbuhan ekonomi yang hanya terpusat di wilayah tertentu atau pada sektor-sektor padat modal justru berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan wilayah. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan karena mencerminkan peningkatan produktivitas, pendapatan masyarakat, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Menurut Sukirno dalam (Munir et al., 2025) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menunjukkan adanya kemajuan dalam sektor produksi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Dalam konteks Pembangunan ekonomi, Todaro dan Smith dalam (Gai et al., 2024) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses peningkatan kapasitas produktif suatu negara yang disertai dengan transformasi sosial, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan. Artinya, pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga

sejauh mana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia berlandaskan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pemerintah menekankan prinsip *equitable growth*, yakni pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara agregat tetapi juga merata secara spasial. Prinsip ini dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menempatkan pengurangan ketimpangan regional sebagai prioritas pembangunan nasional. Namun, idealisme tersebut masih jauh dari kenyataan. Perbedaan tingkat kemajuan antarwilayah di Indonesia cukup tajam, khususnya antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Akar dari ketimpangan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, yang menegaskan bahwa Indonesia dibagi ke dalam dua kawasan besar: Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pembagian ini menjadi strategis karena dimaksudkan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan karakteristik, potensi, dan tantangan masing-masing kawasan.

KBI yang meliputi Sumatra, Jawa, dan sebagian Kalimantan, merupakan wilayah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi tinggi. Wilayah ini memiliki infrastruktur memadai, tingkat industrialisasi tinggi, serta kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sebaliknya, KTI yang mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, masih tertinggal dalam berbagai

aspek seperti akses infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas fiskal daerah. Pembangunan ekonomi di kawasan ini seringkali berjalan lebih lambat, sehingga berpengaruh langsung terhadap ketimpangan kesejahteraan nasional.

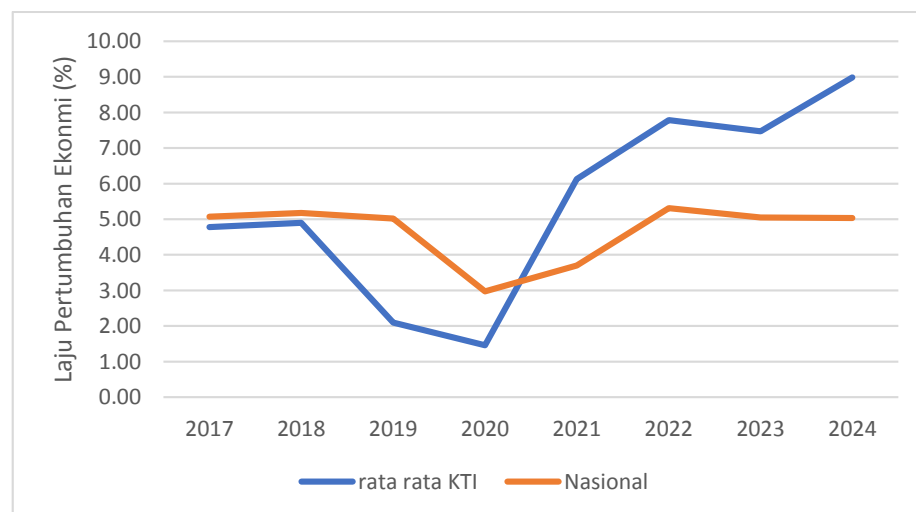
Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024, pemerintah kembali menetapkan sejumlah provinsi di KTI yang tergolong daerah tertinggal, antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Penetapan ini mempertegas bahwa meskipun program pembangunan dan transfer fiskal telah berjalan lebih dari dua dekade sejak reformasi otonomi daerah, masih terdapat daerah-daerah yang belum mampu mengejar ketertinggalan ekonominya.

Data (Badan Pusat Statistik, 2024) menunjukkan bahwa kontribusi PDRB wilayah KBI terhadap total PDB nasional mencapai lebih dari 80%, sedangkan KTI hanya sekitar 19–20% sepanjang 2017–2024. Padahal, KTI memiliki luas wilayah dan potensi sumber daya alam yang jauh lebih besar. Misalnya, Papua dan Papua Barat kaya akan sumber daya mineral, sementara Maluku serta Nusa Tenggara dikenal dengan potensi perikanan dan pariwisatanya. Ironisnya, kekayaan alam tersebut belum berhasil diubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir cenderung stabil dengan laju sebesar 3,69% pada tahun 2021, meningkat menjadi 5,31% pada tahun 2022, dan tetap berada di kisaran 5,05%

hingga 5,03% pada tahun 2023 dan 2024 (BPS, 2025). Meskipun capaian ini menandakan pemulihan ekonomi pascapandemi, kesenjangan antarwilayah masih terlihat jelas, terutama antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.

Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang meliputi tujuh provinsi tertinggal Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi yang tidak konsisten sepanjang periode 2017–2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, (data diolah)

Gambar 1 1 Perbandingan Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tertinggal KTI dan Nasional Tahun 2017-2024

Grafik diatas menunjukkan perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi nasional dan rata-rata tujuh provinsi tertinggal Kawasan Timur Indonesia (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, NTB, dan NTT) selama periode 2017–2024. Secara umum terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan provinsi tertinggal KTI menunjukkan fluktuasi yang jauh lebih tajam dibandingkan pertumbuhan nasional.

Pada 2017–2018, rata-rata pertumbuhan provinsi tertinggal masih berada dekat dengan pertumbuhan nasional, yaitu sekitar 4,7% hingga 4,9%. Namun, mulai 2019 rata-rata KTI mengalami penurunan signifikan hingga mencapai titik terendah pada 2020 sebesar 1,46%. Kontraksi ini terutama dipengaruhi oleh perlambatan tajam di Papua dan Papua Barat serta penurunan kinerja sektor pariwisata di NTB dan NTT. Sementara itu, pertumbuhan nasional meskipun melambat tetap berada di kisaran 2,97% pada 2020.

Mulai 2021, rata-rata pertumbuhan provinsi tertinggal KTI melonjak tajam menjadi 6,13%, jauh melampaui pertumbuhan nasional 3,70%. Kenaikan drastis ini tidak terjadi secara merata, melainkan didorong oleh lonjakan pertumbuhan di Maluku Utara sebesar 11,79% dan Sulawesi Tengah sebesar 9,68%. Kedua provinsi tersebut memasuki fase ekspansi industri pemurnian mineral yang menyebabkan akselerasi pertumbuhan sangat kuat dan berpengaruh besar terhadap rata-rata kawasan.

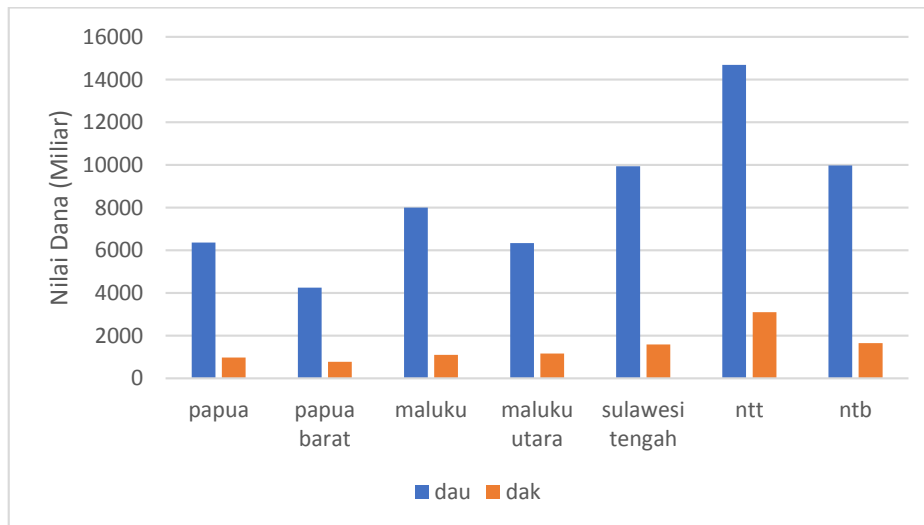
Tren peningkatan berlanjut pada 2022–2024, di mana rata-rata pertumbuhan provinsi tertinggal KTI mencapai puncak pada 2024 sebesar 8,99%. Pendorong utama kembali berasal dari Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang mencatat tingkat pertumbuhan dua digit, disertai stabilisasi pertumbuhan Papua, Papua Barat, dan NTB. Sementara itu, pertumbuhan nasional justru relatif stagnan di kisaran 5%.

Dengan demikian, grafik menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi provinsi tertinggal KTI sangat bergantung pada perkembangan sektor pertambangan dan industri hilirisasi di dua provinsi utama, yaitu Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Ketergantungan ini membuat rata-rata pertumbuhan kawasan

menjadi sangat volatil, berbeda dengan pola pertumbuhan nasional yang jauh lebih stabil.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan dan rendahnya efisiensi pembangunan daerah adalah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal yang belum optimal. Desentralisasi fiskal, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bertujuan memberikan kewenangan fiskal kepada daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja sesuai kebutuhan lokal. Instrumen utama desentralisasi fiskal meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, n.d.)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (DJPk)

Gambar 1 2 Jumlah Transfer DAU & DAK Provinsi Tertinggal KTI 2024

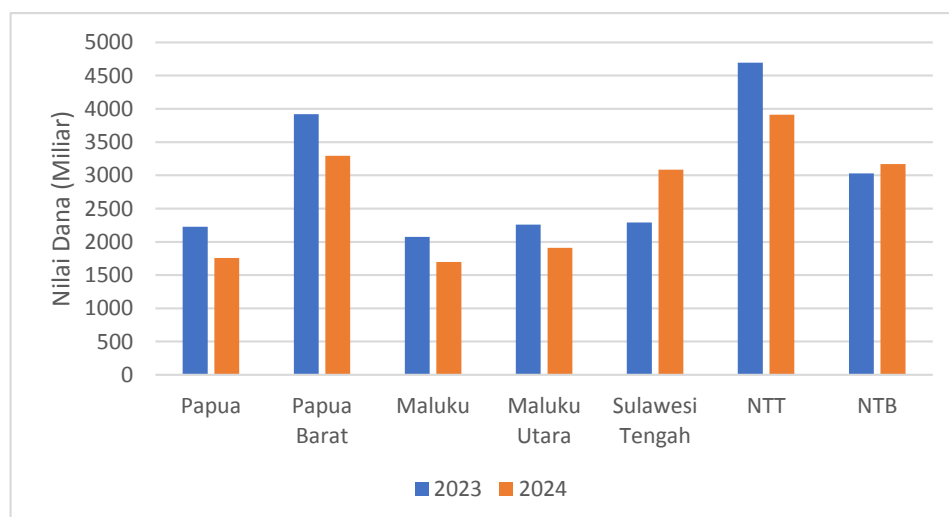
Peningkatan alokasi dana transfer tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari grafik terlihat bahwa provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima alokasi DAU tertinggi, mencapai sekitar Rp14,7 triliun, disusul oleh Sulawesi Tengah dan NTB yang masing-masing berada di kisaran Rp9,9–10 triliun. Sementara itu, Papua Barat memperoleh DAU terendah, sekitar Rp4,2 triliun.

Pada sisi lain, nilai DAK relatif jauh lebih kecil dibandingkan DAU di seluruh provinsi. DAK tertinggi juga dicatat oleh NTT sekitar Rp3 triliun, sedangkan provinsi lain seperti Papua, Maluku, dan Maluku Utara hanya menerima sekitar Rp1 triliun atau kurang.

Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi transfer fiskal pusat belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kebutuhan pembangunan antarprovinsi tertinggal. NTT yang menerima dana transfer terbesar justru menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 3,73%, sedangkan provinsi dengan

alokasi lebih kecil seperti Maluku dan Papua justru tumbuh lebih tinggi, masing-masing 5,34% dan 4,11%. Besarnya alokasi transfer fiskal tidak otomatis menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal. Efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana tersebut menjadi faktor utama penentu keberhasilan pembangunan daerah. Menurut (Mardiasmo, 2009), efisiensi fiskal merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam mengonversi sumber daya fiskal menjadi output pembangunan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat

Selain itu, belanja modal daerah menjadi instrumen penting dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. (Kementerian Keuangan).



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (data diolah)

Gambar 1 3 Tren Belanja Modal Provinsi Tertinggal KTI Tahun 2023-2024

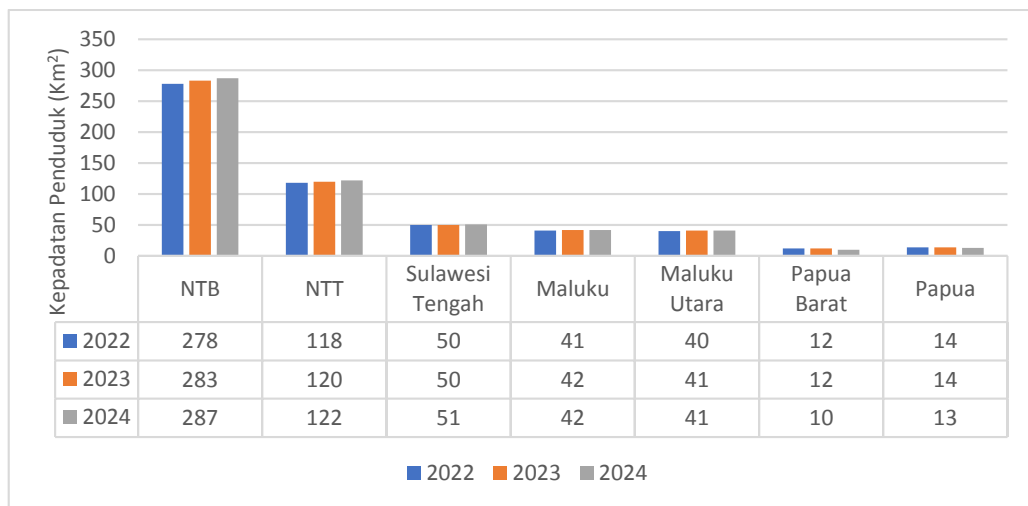
Grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sebagian besar provinsi tertinggal di Kawasan Timur Indonesia mengalami penurunan belanja modal dibandingkan tahun 2023. NTT memiliki belanja modal tertinggi pada kedua tahun, yaitu sekitar Rp4.700 miliar pada 2023 dan menurun menjadi Rp3.900 miliar pada 2024. Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara juga menunjukkan tren penurunan. Sebaliknya, Sulawesi Tengah mengalami kenaikan, dari sekitar Rp2.000 miliar menjadi sekitar Rp3.200 miliar, sedangkan NTB relatif stabil.

Secara umum, tren ini menandakan adanya penghematan atau penyesuaian anggaran belanja modal di sebagian besar provinsi tertinggal. Penurunan ini dapat berdampak pada lambatnya peningkatan infrastruktur dan aktivitas ekonomi daerah, sehingga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Konsep *fiscal multiplier* menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah akan memberikan dampak pengganda terhadap perekonomian apabila dialokasikan secara tepat dan produktif. Efisiensi penggunaan DAU, DAK, dan belanja modal menjadi prasyarat utama agar anggaran publik mampu menciptakan efek pengganda yang optimal, baik dalam bentuk peningkatan output, penciptaan lapangan kerja, maupun perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks KTI yang menghadapi keterbatasan fiskal dan struktural, isu efisiensi menjadi semakin krusial karena ruang fiskal yang tersedia harus mampu menghasilkan dampak pembangunan yang maksimal.

Perbedaan capaian pembangunan antar daerah di KTI juga dipengaruhi oleh karakteristik demografis dan sosial ekonomi masing-masing provinsi. Misalnya

Kepadatan penduduk, berkaitan erat dengan konsep *economies of scale* dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi cenderung memiliki biaya pelayanan publik per kapita yang lebih rendah, sehingga berpotensi mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan kepadatan penduduk rendah dan wilayah yang tersebar menghadapi tantangan efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan anggaran publik.



Sumber: Badan Pusat Statistik, (data diolah)

Gambar 1 4 Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Tertinggal KTI Tahun 2022-2024

Berdasarkan grafik kepadatan penduduk provinsi-provinsi tertinggal di Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2022–2024, terlihat adanya disparitas demografis yang signifikan antarwilayah. Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk NTB mencapai 287 jiwa per km² dan NTT 122 jiwa per km², jauh melampaui Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua yang berada di bawah 60

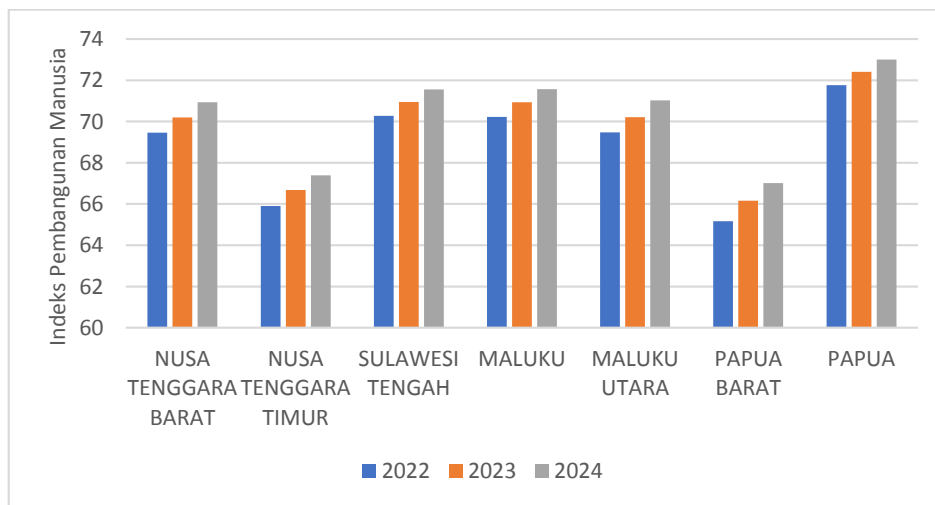
jiwa per km². Provinsi Papua dan Papua Barat secara konsisten mencatat kepadatan penduduk terendah, masing-masing sekitar 13 dan 10 jiwa per km² pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan karakteristik wilayah dengan sebaran penduduk yang sangat jarang, topografi berat, serta keterbatasan aksesibilitas antarwilayah. Kepadatan penduduk yang rendah berimplikasi pada tingginya biaya penyediaan layanan publik dan infrastruktur per kapita, sehingga berpotensi menurunkan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa faktor demografis bukan berasal dari tekanan pertumbuhan penduduk yang cepat, melainkan dari keterbatasan daya tarik ekonomi dan investasi yang mampu mendorong konsentrasi penduduk.

Dalam perspektif *economies of scale*, daerah dengan kepadatan penduduk lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan belanja publik, karena biaya penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar dapat ditekan melalui skala ekonomi. Sebaliknya, daerah dengan kepadatan penduduk rendah menghadapi tantangan struktural dalam mencapai efisiensi fiskal, meskipun menerima alokasi dana transfer yang relatif besar.

Kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan faktor fundamental dalam menentukan efektivitas belanja publik. Indeks ini mencerminkan capaian dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang merupakan komponen penting dalam human capital dan pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2020).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil provinsi yang efisien dalam mengonversi belanja publik menjadi peningkatan IPM, yang

menandakan adanya hubungan erat antara kualitas sumber daya manusia dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah (Susanti et al., 2022). Oleh karena itu, daerah dengan IPM yang lebih tinggi cenderung lebih responsif terhadap kebijakan pembangunan dan mampu memanfaatkan anggaran publik secara lebih efisien (Todaro & Smith, 2020).



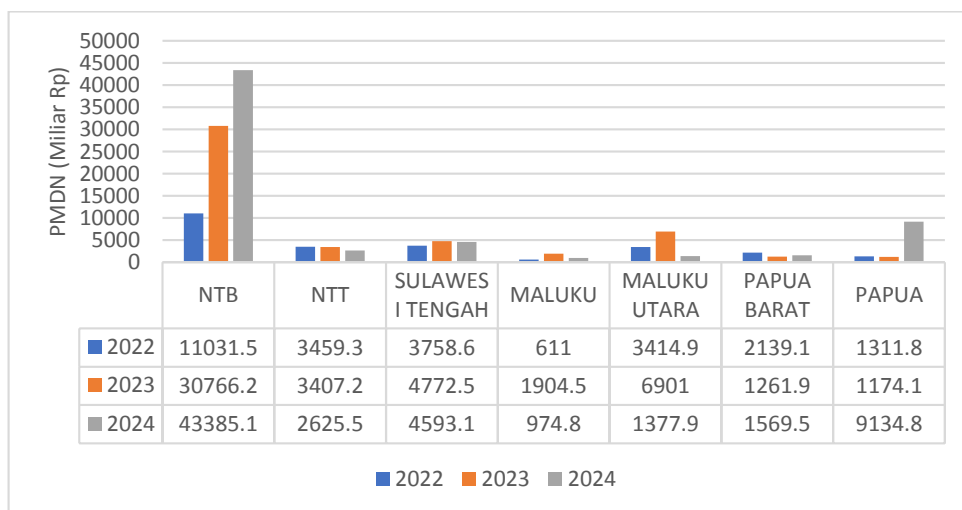
Sumber: Badan Pusat Statistik, (data diolah)

Gambar 1 5 Tingkat IPM provinsi Tertinggal KTI Tahun 2022-2024

Grafik diatas menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten di seluruh provinsi, meskipun masih terdapat ketimpangan antarwilayah. Papua mencatat IPM tertinggi dan terus meningkat hingga sekitar 73 pada tahun 2024, sementara Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara berada pada kelompok menengah dengan nilai IPM berkisar 70-72. Sebaliknya, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat masih memiliki IPM relatif rendah meskipun menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Perbedaan capaian IPM ini mencerminkan variasi kualitas sumber daya manusia antarprovinsi.

Dalam perspektif teori *human capital*, daerah dengan IPM lebih tinggi memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengonversi belanja publik menjadi *output* pembangunan, sehingga berpotensi mencapai tingkat efisiensi fiskal yang lebih tinggi (Becker, 1964).

Disisi lain Investasi juga berperan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi dan memperkuat dampak belanja pemerintah melalui mekanisme *crowding-in*. Dalam teori pertumbuhan endogen, investasi mendorong akumulasi modal dan transfer teknologi yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, tingkat investasi di daerah diperkirakan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai efisiensi penggunaan anggaran publik.



Sumber: Badan Pusat Statistik, (data diolah)

Gambar 1 6 Tingkat Investasi (PMDN) Provinsi Tertinggal KTI

Perkembangan investasi di provinsi-provinsi tertinggal Kawasan Timur Indonesia (KTI) menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antarwilayah. Beberapa provinsi mampu menarik investasi dalam jumlah relatif tinggi, sementara

provinsi lainnya masih menghadapi keterbatasan investasi akibat hambatan struktural, geografis, dan keterbatasan infrastruktur. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan kapasitas ekonomi daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung aktivitas produksi.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, investasi merupakan faktor kunci yang mendorong akumulasi modal, peningkatan produktivitas, dan penciptaan kesempatan kerja. Menurut *International Monetary Fund* dalam (Prasetyo et al., 2023), peningkatan investasi, khususnya yang didukung oleh belanja pemerintah yang produktif, berpotensi menimbulkan mekanisme *crowding-in* terhadap investasi swasta, sehingga belanja publik tidak hanya berfungsi sebagai stimulus jangka pendek, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, rendahnya investasi dapat membatasi efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efisiensi belanja dan pengelolaan fiskal daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan struktural yang cukup serius. (Ikhwan, 2023) menganalisis efisiensi pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang dilanjutkan dengan regresi Tobit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor demografis, khususnya jumlah penduduk, berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi, yang mengindikasikan pentingnya economies of scale dalam pengelolaan belanja publik daerah. Penelitian (Hartono et al., 2025) mengkaji efisiensi belanja infrastruktur antarprovinsi di Indonesia dengan metode DEA–Tobit dan

menemukan bahwa kapasitas fiskal serta karakteristik wilayah berperan penting dalam menentukan efisiensi belanja pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa besarnya alokasi anggaran tidak secara otomatis menghasilkan kinerja pembangunan yang optimal tanpa didukung oleh kemampuan daerah dalam mengelola input fiskal secara efektif. Penelitian yang dilakukan oleh (Chandra et al., 2023) pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa inefisiensi belanja modal berdampak pada lemahnya efek pengganda fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil ini menguatkan argumen bahwa belanja modal yang tidak dikelola secara efisien berpotensi menghambat kontribusi belanja publik terhadap pembangunan ekonomi. Studi (Effendi & Suyanto, 2025) yang meneliti efisiensi belanja modal di tingkat provinsi menggunakan DEA dan panel Tobit menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak serta-merta meningkatkan efisiensi belanja publik. Variasi efisiensi antardaerah tetap terjadi dan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia serta kapasitas institusional pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis efisiensi penggunaan DAU, DAK, dan belanja modal di provinsi-provinsi tertinggal KTI menjadi relevan untuk dilakukan. Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) digunakan untuk mengukur kemampuan relatif masing-masing provinsi dalam mengonversi input fiskal menjadi output pembangunan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi tersebut, digunakan analisis tahap kedua (*two-stage analysis*) melalui regresi Tobit dengan skor efisiensi DEA sebagai variabel dependen serta kepadatan penduduk, IPM, dan investasi sebagai variabel independen.

Secara metodologis, kebaruan penelitian terletak pada penggunaan pendekatan *two-stage analysis*. Tahap pertama menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengukur skor efisiensi fiskal masing-masing provinsi. Tahap kedua dilanjutkan dengan regresi Tobit untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi variasi tingkat efisiensi tersebut, yaitu kepadatan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan investasi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan efisiensi fiskal dalam kerangka *economies of scale*, *human capital*, dan teori pertumbuhan endogen.

Kebaruan lainnya terletak pada fokus spasial dan temporal penelitian, yaitu provinsi-provinsi tertinggal di Kawasan Timur Indonesia (KTI) selama periode 2017–2024 yang mencakup fase pra-pandemi, pandemi COVID-19, dan pemulihan ekonomi. Rentang waktu ini memberikan gambaran dinamika efisiensi fiskal daerah dalam menghadapi guncangan eksternal dan perubahan kebijakan fiskal nasional, yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu.

Secara konseptual, penelitian ini memperkuat argumen bahwa permasalahan utama pembangunan daerah tertinggal tidak semata-mata terletak pada keterbatasan fiskal, melainkan pada kualitas pengelolaan dan efisiensi penggunaan anggaran publik.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana pembangunan, tetapi juga dengan tingkat efisiensi pemanfaatan dana tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah berupaya memperkuat desentralisasi fiskal melalui peningkatan

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta belanja modal daerah. Namun demikian, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di sejumlah provinsi, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), masih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah dana transfer dan belanja modal tersebut telah dikelola dan dimanfaatkan secara efisien oleh pemerintah daerah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan kuantitatif yang mampu mengukur efisiensi relatif penggunaan anggaran publik antarprovinsi. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam analisis efisiensi sektor publik adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA). Metode ini memungkinkan pengukuran kemampuan masing-masing provinsi dalam mengonversi input fiskal, berupa DAU, DAK, dan belanja modal, menjadi output pembangunan tanpa mengasumsikan keseragaman kapasitas antarwilayah.

Perbedaan tingkat efisiensi antarprovinsi tidak terlepas dari karakteristik struktural dan sosial ekonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengukur tingkat efisiensi fiskal, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi variasi efisiensi tersebut melalui analisis tahap kedua menggunakan regresi Tobit, dengan memasukkan kepadatan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan investasi sebagai variabel penjelas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Provinsi Tertinggal Kawasan Timur Indonesia Tahun 2017-2024”. Temuan penelitian diharapkan mampu menghasilkan

peta efisiensi fiskal daerah yang berbasis bukti empiris, sehingga relevan sebagai dasar perumusan kebijakan transfer fiskal yang lebih berbasis kinerja (*performance-based transfer*) dan berorientasi pada hasil (*outcome-oriented budgeting*).

1.2 Identifikasi Masalah

- 1 Bagaimana tingkat efisiensi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja modal pada provinsi-provinsi tertinggal di Kawasan Timur Indonesia selama periode tahun 2017–2024?
- 2 Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PMDN secara parsial terhadap tingkat efisiensi penggunaan DAU, DAK, dan belanja modal di provinsi-provinsi tertinggal Kawasan Timur Indonesia?
- 3 Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PMDN secara bersama-sama terhadap tingkat efisiensi penggunaan DAU, DAK, dan belanja modal di provinsi-provinsi tertinggal Kawasan Timur Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Menganalisis tingkat efisiensi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja pada provinsi-provinsi tertinggal di Kawasan Timur Indonesia selama periode 2017– 2024.
- 2 Menganalisis pengaruh kepadatan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PMDN secara parsial terhadap tingkat efisiensi

penggunaan DAU, DAK, dan belanja modal di provinsi-provinsi tertinggal Kawasan Timur Indonesia.

- 3 Menganalisis pengaruh kepadatan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PMDN secara bersama sama terhadap tingkat efisiensi penggunaan DAU, DAK, dan belanja modal di provinsi-provinsi tertinggal Kawasan Timur Indonesia.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

- 1 Menjadi referensi empiris mengenai penerapan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengukur efisiensi penggunaan dana publik di tingkat daerah.
- 2 Memperkuat teori fiscal federalism (Musgrave, 1959; Oates, 1972) dan teori pertumbuhan endogen (Romer, 1990) melalui bukti empiris yang menyoroti bagaimana efisiensi alokasi fiskal dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- 3 Menambah literatur mengenai pengaruh DAU, DAK, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama pada konteks wilayah yang masih tertinggal seperti Kawasan Timur Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1 Pemerintah Pusat dan Daerah

Sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan transfer fiskal dan alokasi anggaran yang lebih efektif dan mengoptimalkan penggunaan dana transfer pusat.

2 Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi penelitian lanjutan terkait efisiensi fiskal, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pengembangan metodologi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pendekatan kuantitatif.

3 Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Daerah

Sebagai informasi transparan tentang sejauh mana dana publik digunakan secara efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia, yang meliputi: Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah-wilayah tersebut masuk ke dalam daftar daerah tertinggal dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024.

